Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan
Volume 04, No. 01, Mei – Agustus 2026, pp. 687-703
Website: https://pcpendidikan.org/index.php/jpcp

Belum Optimalnya Pelaksanaan Kurikulum Bahasa Dan Sastra Minangkabau (BSM) Di Kota Solok Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Andi Fery[1*]
[1]Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok, Jl. Lubuk Sikarah No. 89, IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
andifery0877@gmail.com

Abstract
The Curriculum of Minangkabau Language and Literature (MLL) serves as a strategic instrument for cultural preservation and the strengthening of character education based on local wisdom values in Solok City. Nevertheless, the implementation of the MLL curriculum continues to encounter a range of challenges, thereby hindering the full realization of its intended objectives. This policy paper aims to examine and critically discuss the factors contributing to the suboptimal implementation of the curriculum in order to provide an evidence base for formulating a policy recommendation to enhace the effectiveness and efficiency of curriculum implementation. The analysis and discussion reveal several key issues, including the limited competence teachers in delivering MLL curriculum instruction, the inadequate availability of contextualized teaching materials, and the lack of strong support and coordination among the local government, schools, and the community. Thus, this policy paper recommends that the Solok City Government establish a comprehensive MLL Curriculum Governance Policy through local regulations to address the existing challenges.
Keywords: Minangkabau Language and Literature Curriculum, Character Education, Local Wisdoms

Abstrak
Kurikulum Bahasa dan Sastra Minangkabau (BSM) merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kota Solok. Namun demikian, pelaksanaan kurikulum BSM di Kota solok masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tujuan tersebut belum tercapai secara optimal. Policy paper ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kurikulum BSM tersebut agar dapat merumuskan suatu rekomendasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan pelaksanannya secara efektif dan efisiesn. Analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan mulai dari keterbatasan kompetensi guru dalam pengajaran BSM, minimnya ketersediaan bahan ajar yang kontekstual termasuk belum kuatnya dukungan dan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, policy paper ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kota Solok menetapkan Kebijakan Tata Kelola Kurikulum BSM melalui regulasi daerah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada.
Kata Kunci: Kurikulum Bahasa dan Sastra Minangkabau, Pendidikan Berkarakter, Kearifan Lokal

Copyright (c) 2026 Andi Fery

✉Corresponding author: Andi Fery
Email Address: andifery0877@gmail.com (Jl. Lubuk Sikarah No. 89, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumbar)
Received 02 June 2026, Accepted 18 June 2026, Published 24 June 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berpikir, berkomunikasi, dan bertindak (Cook, 2016). Perubahan tersebut memperkuat otonomi individu dalam membentuk identitas serta moralitas pribadi (Veugelers, 2007). Namun di sisi lain, kemajuan tersebut juga menimbulkan dilema karena berpotensi mengurangi kesadaran kritis manusia (Lovvorn & Chen, 2011). Ketidakseimbangan antara kemajuan dan perkembangan moral individu dapat memicu gejala dehumanisasi yang pada akhirnya memunculkan berbagai konflik moral dalam kehidupan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam praktiknya, pendidikan di Kota Solok saat ini masih cenderung

menitikberatkan pada pencapaian aspek kognitif, sedangkan penguatan pendidikan karakter peserta didik belum menjadi fokus utama dan belum dapat diukur secara optimal. Hal ini di perkuat dengan fakta bahwa berbagai fenomena penyimpangan moral masih banyak ditemukan di kalangan pelajar di Kota Solok, seperti sikap intoleransi, perkelahian antar pelajar, bullying, perilaku menyontek, ketidakdisiplinan, hingga memudarnya etika dan tata krama dalam berkomunikasi (Koesoema, 2010; Endah, 2012). Permasalahan ini masih jauh dari harapan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu untuk mengatasi gap tersebut Kota Solok telah mengimplementasikan kurikulum BSM sejak tahun 2022.

Sebagai landasan yuridis dari pelaksanaan kurikulum BSM tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang strategis untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya yang menjadi instrumen penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang berakar pada identitas budaya daerah, sehingga proses pendidikan menjadi lebih kontekstual, relevan, dan bermakna (Yustisia, 2015). Undang-Undang tersebut ditunjang oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Kemudian, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2022 yang merupakan regulasi teknis yang mengatur secara operasional pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal di daerah.

Menindaklanjuti, Peraturan Gubernur diatas yang menegaskan bahwa muatan lokal di Sumatera Barat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pelestarian budaya Minangkabau sekaligus sebagai petunjuk pembentukan karakter peserta didik yang diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat serta berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, maka Kota Solok mengeluarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 29 Tahun 2022 yang merupakan regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau (BSM) sebagai bagian dari sistem pendidikan di Kota Solok. Peraturan ini disusun sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan muatan lokal sekaligus sebagai strategi dalam pelestarian budaya daerah melalui jalur pendidikan formal.

Lebih lanjut, Peraturan Walikota ini menekankan bahwa pembelajaran BSM memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai etika, estetika, moral, spiritual, serta karakter yang berlandaskan adat istiadat dan kearifan lokal Minangkabau terutama nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kota Solok. Oleh karena itu, implementasi muatan lokal BSM tidak hanya berorientasi pada penguasaan bahasa dan sastra daerah, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter peserta didik yang berakar pada identitas budaya lokal.

Dengan demikian, Peraturan Walikota Solok Nomor 29 Tahun 2022 menegaskan bahwa muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan budaya daerah sekaligus memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Kota Solok.

Menyikapi hal ini, Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam merumuskan berbagai kebijakan dan solusi dalam membentuk perilaku dan karakter peserta didik melalui berbagai strategi manajemen pendidikan BSM.

Kurikulum BSM adalah upaya memperkuat identitas budaya, menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta pemahaman terhadap kearifan lokal yang menjadi bagian dari jati diri masyarakat Kota Solok dalam menjawab tantangan memudarnya karakter generasi muda di era globalisasi ini. Kebijakan ini juga sejalan dengan Visi dan Misi Kota Solok, terutama Misi ke 5 yaitu Memperkuat Ketahanan Agama, Adat dan Pemajuan Kebudayaan Sebagai Pilar Pembentukan Karakter dan Peradaban. Salah satu upaya tersebut dapat dicapai dengan penerapan kurikulum BSM yang efektif. Data Dinas Pendidikan Kota Solok menunjukan bahwa implementasi pembelajaran BSM telah dilaksanakan pada sekitar 67 lembaga PAUD, 41 SD negeri, 7 SD swasta, serta 9 SMP (termasuk dua sekolah swasta) (Gambar 1). Data berikut menunjukan bahwa dalam praktiknya, implementasi kurikulum BSM masih belum optimal dan masih jauh dari apa yang diharapkan dalam rangka pembentukan karakter peserta didik (Wiyani, 2012).

Sebagaimana tergambar pada grafik diatas bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kurikulum BSM yang diataranya adalah berkaitan dengan kompetensi tenaga pendidik yang mengajarkan mata pelajaran BSM. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersedianya tenaga pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang Bahasa dan Sastra Minangkabau itu sendiri, sehingga strategi dan pengeloaan BSM menjadi tidak optimal.

Sehingga hal tersebut berdampak pada keterbatasan kapasitas dan kompetensi pendidik dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran melalui kurikulum BSM. Sebagian besar Pendidik yang mengampu BSM saat ini adalah para Pendidik yang berlatar belakang dari Bidang studi yang tidak sesuai. Sehingga Pendidik belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam materi pembelajaran atau kegiatan pendidikan karakter yang diharapkan oleh kurikulum BSM. Kondisi ini menyebabkan implementasi muatan lokal sering kali hanya bersifat teoritis dan kurang kontekstual bagi peserta didik (Supeni et al., 2025).

Kedua, data yang ada juga menunjukan belum adanya sistem pengelolaan kurikulum yang efektif dan efisien (manajemen) kurikulum BSM yang dapat mewujudkan sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi dalam pengelolaan sumber daya yang ada (Muhammad & Rahman, 2017). Kegiatan pengelolaan pada suatu sistem pendidikan bertujuan untuk keterlaksanaan proses belajar mengajar yang baik dengan menggunakan kurikulum yang ada (Sonhadji, 2012). Dinas Pendidikan dalam konteks ini belum mengambil peran secara strategis sebagai aktor kunci dalam memastikan tata kelola kurikulum BSM berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Padahal, Dinas Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, koordinator, dan evaluator dalam keseluruhan siklus manajemen kurikulum yang diterapkan di Satuan Pendidikan.

Ketiga, sebagai fungsi regulatif, Dinas Pendidikan belum menyusun kebijakan teknis yang jelas

dan operasional terkait pengelolaan kurikulum BSM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut perbaikan. Kebijakan ini harus mampu menjawab kekosongan sistem pengelolaan yang selama ini menjadi kendala, sehingga setiap satuan pendidikan memiliki pedoman yang terstandar namun tetap fleksibel sesuai dengan konteks lokal.

Keempat, Dinas Pendidikan belum melakukan koordinasi dan kolaborasi secara optimal, sehingga pelaksanaan kurikulum ini masih berjalan secara sporadis dan belum terlembagakan dalam sistem yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan belum adanya penyusunan pedoman kerja sama, penguatan jejaring antar lembaga, serta integrasi program lintas sektor. Dengan demikian, saat ini implementasi kurikulum BSM masih bersifat lokal di setiap Satuan Pendidikan dan belum menjadi ekosistem pendidikan yang utuh, kontekstual, dan berkelanjutan. Sehingga saat ini, nilai-nilai lokal yang menjadi ruh kurikulum BSM belum diinternalisasikan secara lebih mendalam dalam proses pendidikan, sehingga berhenti pada tataran konseptual, dan belum benar-benar terwujud dalam sikap dan perilaku peserta didik.

Kelima, masih adanya keterbatasan perangkat pendukung seperti modul, bahan ajar, dan pedoman operasional yang secara khusus dirancang untuk implementasi kurikulum BSM. Tanpa adanya perangkat tersebut, kurikulum BSM akan sulit untuk diimplementasikan program secara konsisten dan terarah (Tang et al., 2023).

Dengan masih adanya akar permasalahan tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu problem statement sebagai berikut; belum optimalnya implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Kurikulum BSM disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas dan tata kelola penyelenggaraan kurikulum yang ditandai dengan belum tersedianya sistem implementasi yang terstruktur, dukungan pemangku kepentingan yang memadai, serta perangkat pembelajaran yang mendukung.

METODE

Policy paper ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan mengadopsi metode analisis kebijakan publik menurut Dunn (1999). Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, serta Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Pendidikan Kota Solok, satuan pendidikan, pendidik, dan pihak terkait lainnya dengan menggunakan matriks penilaian alternatif kebijakan. Objek kajian *policy paper* ini adalah implementasi Kurikulum Bahasa dan Sastra Minangkabau (BSM) di Kota Solok dalam mewujudkan Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada kriteria dan tahapan analisis kebijakan Dunn (1999).

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Dan Pembahasan

Permasalahan implementasi kurikulum BSM sebagaimana yang digambarkan didalam problem statement diatas mencerminkan adanya kelemahan struktural dan fungsional dalam sistem pendidikan,

sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis konteks lokal. Dalam hal ini, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama, mengingat keberhasilan implementasi kurikulum sangat ditentukan oleh kapasitas aktor pelaksana di tingkat satuan pendidikan.

Pendidik idealnya memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai keminangkabauan sebagai basis utama dalam implementasi kurikulum BSM. Pemahaman tersebut tidak harus selalu diperoleh dari latar belakang pendidikan formal keminangkabauan, karena di Sumatera Barat sendiri belum ada Universitas yang dapat menghasilkan lulusan dengan Jurusan Keguruan Bahasa dan Sastra Minangkabau yang ada baru jurusan Ilmu Budaya secara umum yang didalamnya juga mempelajari budaya Minangkabau. Oleh karena itu Pendidik dapat dikembangkan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh tenaga pendidik tetap memiliki kompetensi kultural yang memadai dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam proses pembelajaran (Ningsih & Ediyono, 2018).

Pendekatan ini lebih inklusif dan adaptif, karena membuka ruang bagi berbagai latar belakang tenaga pendidik, namun tetap menjaga substansi utama kurikulum BSM. Selain itu, Dinas Pendidikan juga perlu berperan dalam menyediakan program peningkatan kapasitas, seperti workshop budaya, dan pengembangan modul pembelajaran kontekstual berbasis keminangkabauan. Dengan formulasi ini, tujuan internalisasi nilai budaya tetap tercapai tanpa mengorbankan fleksibilitas dan keberlanjutan sistem pendidikan (Praekanata et al., 2024).

Disamping itu, menurut Epstein (2002) penguatan kolaborasi multipihak (multi-stakeholder engagement) merupakan elemen krusial dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Dinas Pendidikan perlu memfasilitasi terbentuknya forum kemitraan antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemangku adat, serta mengembangkan mekanisme kerja sama yang terlembagakan dan berkelanjutan. Keterlibatan orang tua dapat diarahkan pada penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga, sementara partisipasi masyarakat dan tokoh adat dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran kontekstual, program budaya sekolah, dan penguatan nilai-nilai sosial. Sinergi ini diharapkan mampu menghilangkan fragmentasi dalam implementasi kurikulum, sehingga proses pendidikan berlangsung secara holistik dan integratif. Selain itu, keterlibatan tokoh adat seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai sebagai sumber belajar dan mitra edukatif menjadi penting dalam memperkaya proses pembelajaran, sehingga nilai-nilai budaya tidak hanya bersifat konseptual, tetapi terinternalisasi secara nyata dalam pengalaman belajar peserta didik.

Di sisi lain, reformulasi sistem manajemen kurikulum BSM perlu dilakukan melalui penataan siklus pengelolaan yang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi secara terpadu. Dinas Pendidikan sebagai pemegang otoritas kebijakan harus menyusun pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur sebagai acuan bagi satuan pendidikan.

Penguatan tata kelola ini juga dapat didukung melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan kurikulum. Dengan demikian, implementasi kurikulum tidak berjalan secara sporadis, melainkan terarah, terstandar, dan berkelanjutan (Mulyasa, 2023).

Lebih lanjut Cheng (2022) menyatakan bahwa aspek kebijakan memerlukan intervensi yang lebih konkret melalui penyusunan regulasi yang operasional dan kontekstual, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan teknis di tingkat Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut harus mampu mengakomodir pengembangan model implementasi kurikulum BSM yang bersifat fleksibel namun tetap memiliki kerangka standar yang jelas, serta terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam konteks ini, pendekatan school-based curriculum development menjadi relevan untuk memberikan ruang adaptasi bagi sekolah sesuai dengan karakteristik sosial-budaya lingkungan masing-masing, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar kurikulum nasional.

Pada akhirnya, optimalisasi peran Dinas Pendidikan sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan evaluator menjadi kunci dalam memastikan efektivitas implementasi kurikulum BSM. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan dukungan sumber daya yang memadai, penguatan fungsi supervisi berbasis pembinaan, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan berbasis indikator kinerja. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik, khususnya terkait perubahan sikap, perilaku, dan internalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan pendekatan kebijakan yang integratif, adaptif, dan berkelanjutan, implementasi kurikulum BSM diharapkan mampu mencapai tujuan substantifnya, yaitu membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau (Suanto & Nurdiyana, 2020).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa mendidik karakter peserta didik dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal mengandung konsep bahwa budaya merupakan elemen penting yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena budaya memiliki implikasi inovasi dan perubahan, serta budaya menjadi sumber perubahan itu sendiri (Sulhan, 2018). Menurut Uge et al. (2019), Nilai-nilai budaya ini mempengaruhi bagaimana anak-anak berinteraksi dengan sesama dan linkungannya. Pentingnya pendidikan karakter menurut Ericha (2019) haruslah diberikan keteladanan oleh semua pihak yang terkait didalam maupun diluar sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan kurikulum BSM dibutuhkan sistem dan arah yang jelas agar dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks lokal. Sehingga diharapakan dengan adanya arah dan kebijakan dari Dinas Pendidikan, sekolah dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakar kuat pada identitas budaya (Rohman, 2019).

Solusi dan alternatif lainnya yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelesaian masalah yang ada adalah sebagaimana dikemukan oleh Fimansyah (2021) yang menjelaskan bahwa internalisasi

pendidikan karakter melalui kurikulum BSM dapat dilakukan melalui cerita tradisional Minangkabau yang mengandung muatan nilai-nilai moral yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Cerita-cerita tradisional ini dalam istilah Minangkabau disebut Kaba. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal juga dapat diimplementasikan melalui ungkapan-ungkapan bijak yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang patut dijadikan acuan atau pedoman yang dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Ilmi, 2015).

Senada dengan hal tersebut Alwidora & Wirdanengsih (2020) berpendapat harus ada integrasi budaya Minangkabau di Kota Solok ke dalam implementasi kurikulum BSM, baik di dalam maupun di luar kelas. Melengkapi pendapat diatas, Afridinata et al. (2018) berpendapat bahwa bahwa pelaksanaan pendidikan karakter berbasiskan nilai-nilai lokal harus dilakukan secara intrakurikuler yang artinya harus ada kebijakan dan pedoman yang dikeluarkan oleh pihak pemegang kebijakan pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan, sehingga dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam pelaksanaannya dilapangan. Sedangkan program pendidikan karakter dan budaya Minangkabau dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budaya Minangkabau seperti randai, belajar pidato adat, dan serta mempelajari dan mempraktekan masakan khas Minangkabau.

Lebih lanjut, menurut Ningsih et al. (2015) berargumen bahwa implementasi pendidikan karakter yang dilakukan melalui pola kegiatan terpadu antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sangat efektif untuk menciptakan kultur pendidikan yang baik. Oleh karena itu, manajemen pendidikan memainkan peran penting dalam melaksanakan kegiatan ini. Pengelolaan kegiatan yang baik oleh Dinas Pendidikan dan pihak Satuan Pendidikan akan membantu peserta didik dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter yang positif (Rohman, 2019).

Pilihan Kebijakan

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan implementasi Kurikulum Bahasa dan Sastra Minangkabau (BSM) di Kota Solok, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual agar pelaksanaan kurikulum mampu berjalan secara efektif serta mencapai tujuan substantifnya. Permasalahan yang mencakup aspek kompetensi pendidik, lemahnya tata kelola implementasi, belum optimalnya kolaborasi multipihak, serta belum terintegrasinya nilai-nilai budaya secara menyeluruh dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa implementasi kurikulum BSM tidak hanya memerlukan pendekatan administratif, tetapi juga pendekatan sosial, budaya, dan kelembagaan secara terpadu. Oleh karena itu, strategi penyelesaian yang dirumuskan harus mampu menjawab seluruh dimensi permasalahan secara holistik dan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa pilihan penyelesaian masalah yang dapat dijadikan alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi implementasi Kurikulum Bahasa dan Sastra Minangkabau (BSM). Setiap alternatif memiliki persamaan tujuan, namun berbeda

pada fokus pendekatan, mekanisme pelaksanaan, serta tingkat intervensi kebijakan yang dilakukan. *Adapun pilihan-pilihan penyelesaian masalah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:*

Penguatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Alternatif pertama adalah penguatan kompetensi pendidik melalui pelatihan, pendampingan, workshop budaya, dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Alternatif ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kesiapan guru sebagai pelaksana utama pembelajaran.

Persamaan alternatif ini dengan pilihan lainnya terletak pada orientasinya untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai budaya Minangkabau dalam proses pendidikan. Namun perbedaannya terletak pada fokus intervensi yang lebih diarahkan kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada perubahan struktur kebijakan semata, melainkan pada penguatan kompetensi kultural dan pedagogis guru agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal secara kontekstual dalam pembelajaran.

Alternatif ini memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi solusi terhadap permasalahan implementasi kurikulum BSM yang selama ini berasal dari keterbatasan pemahaman guru terhadap substansi budaya Minangkabau. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang sistematis, guru akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menerjemahkan nilai-nilai budaya ke dalam praktik pembelajaran, sehingga implementasi kurikulum menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Penguatan Kolaborasi Multipihak (Multi-Stakeholder Engagement)

Alternatif kedua adalah penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan tokoh adat dalam pelaksanaan kurikulum BSM. Pendekatan ini menempatkan pendidikan karakter berbasis budaya sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen sosial.

Persamaan alternatif ini dengan alternatif lainnya adalah sama-sama bertujuan membangun ekosistem pendidikan yang mendukung internalisasi nilai budaya Minangkabau. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada pendekatan partisipatif dan sosial yang digunakan. Jika alternatif pertama berfokus pada guru sebagai aktor utama, maka alternatif ini menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, seperti orang tua, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan masyarakat adat.

Alternatif ini dinilai mampu menjadi solusi karena pendidikan karakter tidak dapat dilaksanakan secara parsial hanya di lingkungan sekolah saja. Sinergi antara sekolah dan lingkungan sosial akan memperkuat proses pembiasaan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Selain itu, keterlibatan tokoh adat sebagai sumber belajar akan menjadikan nilai-nilai budaya lebih nyata, kontekstual, dan mudah dipahami oleh peserta didik.

Reformulasi Sistem Manajemen dan Tata Kelola Kurikulum BSM

Alternatif ketiga adalah reformulasi sistem manajemen kurikulum melalui penguatan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek tata kelola dan administrasi kebijakan pendidikan.

Persamaan alternatif ini dengan alternatif lainnya adalah sama-sama bertujuan meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum BSM. Namun, perbedaannya terletak pada fokus perbaikan sistem dan mekanisme pengelolaan pendidikan. Alternatif ini menekankan pentingnya pedoman teknis, standar operasional prosedur (SOP), sistem monitoring, dan evaluasi berbasis indikator kinerja sebagai instrumen pengendalian implementasi kurikulum.

Alternatif ini memiliki potensi besar menjadi solusi karena selama ini implementasi kurikulum BSM cenderung berjalan sporadis dan belum memiliki standar operasional yang jelas. Dengan adanya tata kelola yang terstruktur dan berbasis sistem informasi manajemen pendidikan, pelaksanaan kurikulum dapat lebih terarah, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penguatan Regulasi dan Kebijakan Operasional

Alternatif keempat adalah penyusunan regulasi dan kebijakan teknis yang lebih operasional, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan daerah. Regulasi tersebut dapat berbentuk peraturan daerah, pedoman teknis, maupun kebijakan Dinas Pendidikan terkait implementasi kurikulum BSM.

Persamaan alternatif ini dengan alternatif lainnya adalah sama-sama mendukung penguatan implementasi kurikulum berbasis budaya lokal. Perbedaannya terletak pada pendekatan normatif dan legal-formal yang digunakan. Alternatif ini lebih menitikberatkan pada penguatan legitimasi kebijakan agar sekolah memiliki landasan hukum dan pedoman yang jelas dalam melaksanakan kurikulum BSM.

Alternatif ini dipandang mampu menjadi solusi karena salah satu hambatan implementasi kurikulum selama ini adalah belum adanya kebijakan teknis yang operasional dan terstandar. Dengan adanya regulasi yang jelas, sekolah akan memiliki arah pelaksanaan yang lebih pasti, sekaligus memberikan kepastian mengenai peran, kewajiban, dan mekanisme implementasi kurikulum BSM di lapangan.

Integrasi Nilai Budaya Minangkabau dalam Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler

Alternatif kelima adalah pengintegrasian nilai budaya Minangkabau ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler secara terpadu. Implementasi ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis kaba, ungkapan adat, randai, pidato adat, seni budaya, serta praktik budaya lokal lainnya.

Persamaan alternatif ini dengan alternatif sebelumnya adalah sama-sama bertujuan menginternalisasikan nilai budaya Minangkabau kepada peserta didik. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada pendekatan implementatif dan praktis yang langsung menyentuh pengalaman belajar siswa.

Alternatif ini sangat potensial menjadi solusi karena peserta didik tidak hanya mempelajari budaya secara teoritis, tetapi juga mengalami dan mempraktikkannya secara langsung dalam kehidupan sekolah. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membentuk karakter dan identitas budaya peserta didik, karena nilai budaya ditanamkan melalui pengalaman nyata dan pembiasaan sosial.

Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

Alternatif keenam adalah pengembangan model pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Minangkabau yang terintegrasi dalam kultur sekolah. Pendekatan ini menempatkan budaya sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter peserta didik.

Persamaan alternatif ini dengan alternatif lainnya adalah sama-sama mengarah pada pembentukan karakter berbasis nilai budaya lokal. Perbedaannya terletak pada orientasi jangka panjang dalam membangun kultur pendidikan yang berakar pada nilai-nilai adat dan sosial masyarakat Minangkabau.

Alternatif ini memiliki peluang besar menjadi solusi karena pendidikan karakter yang berbasis budaya lokal cenderung lebih relevan dengan kehidupan peserta didik. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, sopan santun, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap adat akan lebih mudah diinternalisasikan apabila dikembangkan melalui kultur sekolah yang konsisten dan berkelanjutan.

Metode Pemilihan Alternatif

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sebagaimana telah dibahas pada Pendahuluan, terutama bagian problem statement, penulis mengadopsi pendekatan yang dikemukan oleh Dunn (1999), dimana analisis kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan enam kriteria utama untuk menilai kualitas dan kelayakan suatu alternatif kebijakan. Keenam kriteria tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan mampu menyelesaikan masalah secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun enam kriteria tersebut meliputi efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), kesamaan atau pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan kelayakan atau ketepatan (*appropriateness*). Kriteria pertama yaitu efektivitas (*effectiveness*). Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks implementasi Kurikulum BSM, efektivitas dapat dilihat dari kemampuan kebijakan dalam meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya Minangkabau kepada peserta didik serta memperkuat karakter berbasis kearifan lokal. Suatu strategi dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap perilaku, sikap, dan pemahaman budaya peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dirumuskan.

Sedangkan efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, baik dari segi anggaran, waktu, tenaga, maupun sarana pendukung lainnya. Dalam implementasi kurikulum BSM, kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang mampu mencapai tujuan pendidikan budaya dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan tidak menimbulkan pemborosan. Misalnya, pemanfaatan guru yang sudah ada melalui pelatihan dan pendampingan dinilai lebih efisien dibandingkan harus merekrut tenaga pendidik baru dengan spesialisasi tertentu.

Kecukupan (*adequity*) merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan mampu menyelesaikan masalah secara memadai. Artinya, kebijakan tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi benar-benar mampu menjawab akar permasalahan yang ada. Dalam implementasi kurikulum BSM,

kecukupan dapat dilihat dari kemampuan strategi yang diterapkan dalam mengatasi persoalan kompetensi guru, lemahnya tata kelola, minimnya regulasi teknis, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan budaya. Semakin besar kemampuan kebijakan dalam menjawab keseluruhan masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat kecukupannya.

Selanjutnya kesamaan atau pemerataan berkaitan dengan keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan kepada seluruh kelompok sasaran. Dalam konteks kurikulum BSM, prinsip equity menekankan bahwa seluruh sekolah, guru, dan peserta didik di Kota Solok harus memperoleh kesempatan dan akses yang sama terhadap implementasi program budaya, baik dalam bentuk pelatihan guru, fasilitas pembelajaran, maupun dukungan kebijakan. Kebijakan yang baik tidak hanya menguntungkan sekolah tertentu, tetapi mampu menjangkau seluruh satuan pendidikan secara proporsional dan adil.

Kriteria berikutnya adalah responsivitas (*responsiveness*). Responsivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat. Dalam implementasi kurikulum BSM, responsivitas dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan sekolah, kondisi sosial budaya masyarakat, serta tantangan pendidikan karakter yang berkembang di lingkungan peserta didik. Kebijakan yang responsif akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.

Kelayakan (*appropriatness*) merupakan kriteria pemilihan kebijakan terakhir yang dikemukan oleh Dunn (1999). Kriteria ini adalah agar terjadi kaitan dan kesesuaian kebijakan terhadap nilai, norma, kondisi sosial budaya, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks kurikulum BSM, suatu kebijakan dianggap layak apabila selaras dengan filosofi adat Minangkabau, kebutuhan pendidikan daerah, serta tujuan pembangunan karakter peserta didik. Selain itu, kebijakan juga harus realistis untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sumber daya, kemampuan sekolah, dan dukungan kelembagaan yang tersedia.

Oleh karena itu, enam kriteria dari Dunn (1999) tersebut akan gunakan sebagai kriteria pemilihan alternatif pemecahan masalah kebijakan implementasi kurikulum BSM agar dapat dianalisis secara lebih objektif dan komprehensif. Sehingga kebijakan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dalam menentukan strategi kebijakan yang paling tepat, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan implementasi pendidikan berbasis budaya Minangkabau di Kota Solok dengan menggunakan kurikulum BSM.

Penggunaan metode pemilihan alternatif kebijakan juga dapat melibatkan kembali para ahli (expert judgement) untuk memberikan penilaian atau skor terhadap berbagai alternatif implementasi kurikulum BSM. Pelibatan para ahli tersebut penting dilakukan guna memperoleh hasil analisis yang lebih objektif, komprehensif, dan berbasis pada pertimbangan akademik maupun praktis dengan menggunakan kriteria Dunn diatas. Melalui pemberian skor terhadap setiap alternatif kebijakan, maka

dapat ditentukan alternatif implementasi kurikulum BSM yang paling relevan, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik pendidikan di Kota Solok.

Penentuan skor ini supaya lebih terarah dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang merupakan pendekatan partisipatif-kualitatif yang bertujuan memperoleh konsensus berbasis pengetahuan (knowledge-based consensus) dari para ahli. Dalam konteks perumusan kebijakan implementasi kurikulum BSM, FGD menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan perspektif akademik, praktis, dan kontekstual sehingga alternatif kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif, aplikatif, dan berbasis evidensi.

Secara konseptual, FGD dipahami sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan diskusi terarah dalam kelompok kecil dengan tujuan menggali pandangan, pengalaman, serta argumentasi dari para partisipan yang memiliki kompetensi khusus. Dalam hal ini, partisipan terdiri dari guru besar dan doktor pada bidang Pendidikan, ahli materi pengajaran muatan lokal, serta praktisi pendidikan. Komposisi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder engagement, di mana keberagaman latar belakang keilmuan memungkinkan terjadinya triangulasi perspektif dalam proses pemilihan alternatif kebijakan. Secara akademik, penggunaan FGD dalam pemilihan alternatif kebijakan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam (*in-depth insight*) terhadap isu yang kompleks. Kedua, memungkinkan integrasi antara teori dan praktik melalui interaksi langsung. Ketiga, meningkatkan legitimasi kebijakan.

Berdasarkan hasil FGD yang melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan serta hasil penilaian (*scoring*) terhadap berbagai alternatif kebijakan, diperoleh kesimpulan bahwa alternatif kebijakan yang paling krusial dan prioritas dalam implementasi Kurikulum BSM di Kota Solok adalah penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Penetapan alternatif kebijakan tersebut dilakukan melalui pendekatan analisis kebijakan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Dunn (1999). Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh kriteria tersebut, penguatan kompetensi pendidik dinilai sebagai alternatif yang paling relevan, strategis, dan mampu menjawab akar persoalan implementasi Kurikulum BSM secara komprehensif.

Secara substantif, implementasi Kurikulum BSM tidak hanya menuntut kemampuan administratif dalam menjalankan kurikulum, tetapi juga membutuhkan kapasitas pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai budaya, karakter, dan kearifan lokal kedalam proses pembelajaran. Kurikulum BSM yang berorientasi pada penguatan identitas budaya lokal memerlukan pendidik yang tidak hanya memahami materi ajar secara konseptual, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam strategi pembelajaran yang kontekstual, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, seperti belum meratanya pemahaman guru terhadap substansi Kurikulum BSM, keterbatasan kemampuan dalam menyusun perangkat ajar berbasis budaya lokal, minimnya inovasi metode pembelajaran, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai karakter dan kearifan lokal dalam kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa

permasalahan utama implementasi kurikulum sesungguhnya terletak pada aspek kapasitas sumber daya manusia pendidikan.

Berdasarkan aspek efektivitas, penguatan kompetensi pendidik dinilai memiliki pengaruh paling besar terhadap keberhasilan implementasi Kurikulum BSM. Tenaga Pendidik merupakan pelaksana utama kurikulum di tingkat satuan pendidikan sehingga kualitas implementasi sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman, keterampilan, dan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Semakin tinggi kompetensi guru, maka semakin besar pula peluang tercapainya tujuan kurikulum, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal. Melalui peningkatan kompetensi, guru akan mampu merancang pembelajaran yang lebih partisipatif, kontekstual, dan bermakna sehingga nilai-nilai budaya tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dapat diinternalisasikan dalam perilaku sehari-hari peserta didik.

Dari sisi efisiensi, kebijakan penguatan kompetensi pendidik dinilai relatif realistis dan memungkinkan untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Upaya peningkatan kapasitas guru dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pelatihan (*training*), workshop, pendampingan teknis, coaching, komunitas belajar guru, *in house training* (IHT), maupun kolaborasi dengan perguruan tinggi dan tokoh budaya lokal. Selain itu, pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan tanpa memerlukan perubahan struktur kelembagaan yang besar. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi karena biaya yang dikeluarkan sebanding dengan dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas implementasi kurikulum.

Pada aspek kecukupan (*adequacy*), penguatan kompetensi pendidik dipandang mampu menjawab kebutuhan mendasar dalam implementasi Kurikulum BSM. Selama ini, berbagai program dan kebijakan pendukung implementasi kurikulum seringkali belum memberikan hasil optimal karena belum menyentuh akar masalah utama, yaitu kapasitas pelaksana kebijakan itu sendiri. Kurikulum yang baik tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan menjadi kebutuhan fundamental agar seluruh proses implementasi kurikulum dapat berjalan secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan.

Ditinjau dari aspek pemerataan (*equity*), kebijakan penguatan kompetensi juga dinilai memiliki dampak yang lebih luas dan merata bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Solok. Program peningkatan kompetensi dapat dirancang untuk menjangkau seluruh guru, baik pada tingkat sekolah dasar maupun menengah, sehingga tidak terjadi kesenjangan kualitas implementasi antar sekolah. Pemerataan kompetensi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh kualitas pembelajaran yang sama dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai budaya serta karakter yang menjadi tujuan utama Kurikulum BSM. Dengan adanya pemerataan kapasitas pendidik, maka standar implementasi kurikulum di setiap sekolah dapat lebih seragam dan terukur.

Selanjutnya, pada aspek responsivitas (*responsiveness*), alternatif kebijakan ini dinilai paling sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan pendidikan. Hasil FGD menunjukkan bahwa sebagian besar peserta, baik dari unsur pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, pengawas, maupun tokoh masyarakat, memandang bahwa peningkatan kompetensi guru merupakan kebutuhan yang mendesak dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum BSM. Guru sebagai pelaksana utama di lapangan membutuhkan dukungan nyata dalam bentuk peningkatan kapasitas, pendampingan, serta penyediaan referensi dan perangkat pembelajaran yang memadai. Dengan demikian, kebijakan ini dianggap responsif terhadap kondisi riil dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum.

Sementara itu, dari aspek ketepatan (*appropriateness*), penguatan kompetensi pendidik dinilai sebagai alternatif kebijakan yang paling tepat sasaran karena langsung menyentuh faktor inti yang memengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum BSM. Permasalahan implementasi tidak hanya berkaitan dengan regulasi atau dokumen kurikulum, tetapi lebih pada bagaimana kurikulum tersebut dipahami dan diterapkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pendidik menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan secara sistematis dalam proses pendidikan.

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil analisis tersebut, maka penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dapat ditetapkan sebagai prioritas kebijakan dalam implementasi Kurikulum BSM di Kota Solok. Kebijakan ini perlu dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dinas pendidikan, satuan pendidikan, perguruan tinggi, maupun tokoh adat dan masyarakat. Implementasi kebijakan penguatan kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai budaya dan karakter lokal pada peserta didik sebagai bagian dari upaya membangun identitas dan karakter generasi muda di Kota Solok.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum BSM di Kota Solok, rekomendasi kebijakan yang dipandang strategis dan relevan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum BSM tersebut. Rekomendasi kebijakan ini disusun sebagai bentuk upaya sistematis dalam menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan implementasi kurikulum BSM yang masih dihadapi di sektor pendidikan di Kota Solok. Rekomendasi kebijakan ini adalah berikut;

Pemerintah Kota Solok perlu menetapkan Kebijakan Tata Kelola Kurikulum Bahasa dan Sastra Minangkabau (BSM) melalui regulasi daerah sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal. Kebijakan ini diperlukan untuk mengatasi lemahnya tata kelola implementasi Kurikulum BSM yang ditandai oleh belum adanya standar pelaksanaan yang seragam, belum terintegrasinya peran para pemangku kepentingan, serta belum adanya mekanisme akuntabilitas yang menjamin keberlanjutan implementasi kurikulum.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menempatkan Kurikulum BSM sebagai bagian integral dari sistem pendidikan daerah melalui pengaturan yang memberikan kepastian hukum, kejelasan kewenangan, keseragaman standar, dan keberlanjutan pelaksanaan pada seluruh satuan pendidikan. Dengan adanya kebijakan ini, implementasi Kurikulum BSM tidak lagi bergantung pada komitmen individual sekolah atau pendidik, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan daerah yang terlembagakan.

Melalui kebijakan tata kelola yang kuat, Pemerintah Kota Solok melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Solok dapat memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Kurikulum BSM berjalan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan sehingga tujuan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau, penguatan identitas lokal, dan pembentukan karakter peserta didik dapat tercapai secara lebih efektif. Kebijakan ini sekaligus menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan berbagai instrumen pendukung implementasi kurikulum di masa mendatang.

KESIMPULAN

Belum optimalnya pelaksanaan Kurikulum Bahasa dan Sastra Minangkabau (BSM) di Kota Solok menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya dan pembentukan karakter peserta didik berbasis nilai-nilai kearifan lokal belum didukung oleh sistem tata kelola yang memadai. Berbagai permasalahan, seperti belum adanya standar pelaksanaan yang seragam, lemahnya koordinasi pemangku kepentingan, serta belum tersedianya mekanisme akuntabilitas dan keberlanjutan implementasi menyebabkan pelaksanaan Kurikulum BSM belum berjalan secara efektif dan sistematis. Berdasarkan kondisi tersebut, rekomendasi yang dipandang paling strategis adalah penetapan Kebijakan Tata Kelola BSM melalui regulasi daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pendidikan berbasis budaya dan kearifan local. Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab, menyeragamkan standar pelaksanaan, serta menjamin keberlanjutan implementasi Kurikulum BSM pada seluruh satuan Pendidikan di Kota Solok. Melalui kebijakan tata kelola yang terlembagakan dan didukung oleh peran aktif Dinas Pendidikan Kota Solok serta seluruh pemangku kepentingan implementasi Kurikulum BSM diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan demikian tujuan pelestarin bahasa dan budaya Minangkabau, penguatan identitas lokal, serta pembentukan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dapat diwujudkan secara lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga *policy paper* ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya terima kasih kepada Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas atas dukungan, pembinaan, dan kesempatan pengembangan kapasitas yang telah diberikan dan terima kasih yang tak

terhingga kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Solok dan unsur pimpinan atas dukungan, arahan, dan fasilitasi yang diberikan. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan sejawat yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, masukan, serta bantuan dalam berbagai bentuk selama proses penulisan. Terakhir, kepada Dinas Pendidikan Kota Solok, dan jajaran, kepala sekolah, guru Bahasa dan Sastra Minangkabau serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini.

REFERENSI

Cheng, Y. C. (2022). School Effectiveness and School-Based Management: 2nd Edition. London. Routledge.

Cook, V. (2016). Second language learning and language teaching: 5th Edition. New York. Routledge.

Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Epstein, J. L. (2002). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. ADOLESCENCE-SAN DIEGO-, 37, 435-435. https://www.govinfo.gov/content/pkg/ERIC-ED467082/pdf/ERIC-ED467082.pdf

Ilmi, D. (2015). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal melalui ungkapan bijak Minangkabau. Journal of Islamic & Social Studies, 1(1), 45-54. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.7

Koesoema, D. 2007. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. PT Grasindo.

Lovvorn, A. S., & Chen, J.S. (2011). Developing a global mindset: The relationship between an international assignment and cultural intelligence. International Journal of Business and Social Science, 2(9), 275-283.

Muhammad, S., & Rahman, M. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Edukasi, 15(1), 610–620. https://doi.org/10.33387/j.edu.v15i1.279

Mulyasa, H.E. (2023). Implementasi kurikulum merdeka. Bumi Aksara.

Ningsih, T.Z., & Ediyono, S. (2018). Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pepatah Petitih Minangkabau ke dalam Pembelajaran Sejarah. 186.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Local. Padang: Pergub.

Peraturan Wali Kota Solok Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau. Kota Solok: Perwali.

Praekanata, I.W.I., Virnayanthi, N.P.E.S., Juliangkary, E., & Ratnaya, I.G. (2024). Menelusuri arah pendidikan: Dinamika dan inovasi kurikulum di Indonesia. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Suanto, S., & Nurdiyana, N. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(2), 107-114. https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p107-114

Supeni, S., Wartoyo., Agustina R., Prastyo D. (2025). Implementasi kurikulum muatan lokal berbasis seni budaya daerah dalam pengembangan pendidikan karakter pada siswa SD. Jurnal Masyarakat Mandiri, 9(5), 4793-4806. https://doi.org/10.31764/jmm.v9i5.33857

Tang, J., Manda, I., Tang, S., & Subehan, S. (2023). Implementasi Nilai Dalam Penguatan Karakter Melalui Budaya Sekolah Berbasis Kearifan Lokal. Visi Sosial Humaniora, 4(1), 18-28. https://doi.org/10.51622/vsh.v4i1.1820

Uge, S., Neolaka, A., & Yasin, M. (2019). Development of Social Studies Learning Model Based on Local Wisdom in Improving Students' Knowledge and Social Attitude. International Journal of Instruction, 12(3), 375-388. https://doi.org/10.29333/iji.2019.12323a

Undang-Undang Nomor 20. (2003). Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.

Veugelers, W. (2007). Creating critical-democratic citizenship education: empowering humanity and democracy in Dutch education. Compare: a Journal of comparative and international education, 37(1), 105-119. https://doi.org/10.1080/03057920601061893

Wiyani, N.A. (2012). Manajemen pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya di sekolah. Yogyakarta: Pedagogia.

Yustisia, T.V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Visi Media.